



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LKIP

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

25 Februari 2025
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

SUTIYOSO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP: 197210051998031014

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA	3
E. SARANA PRASARANA	4
F. ANGGARAN	6
G. ISU STRATEGIS	9
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS	11
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	13
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	15
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	18
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2024	18
B. CAPAIAN KINERJA	19
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN.....	21
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA	46
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN.....	47
F. F. REALISASI ANGGARAN	49
BAB IV. PENUTUP.	53
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	

- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
- Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD**
- Lampiran 5. Cascading**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER Tahun 2023

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yaitu Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain – Lainnya.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain - Lainnya mendapat predikat nilai Baik Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indicator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator dengan capaian tergolong Baik.

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat oleh SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER telah

dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 1(satu) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori Baik.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 99% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 75.145.469.259 dan Belanja Modal sebesar 1% atau sebesar Rp 1.381.998.100

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 69.401.562.916 atau 90,69 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan adanya pergeseran anggaran.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD dan kegiatan-kegiatan DPRD yang bersifat tentatif dan seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional.

2. Kompetensi SDM tentang sistem kinerja pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen - dokumen kinerja

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2025 antara lain :

1. Perlu dilakukan upaya- upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang sistem kinerja pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen - dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

2. Perlu adanya pemerintahan yang memadai dengan penerapan SAKIP di instansi pemerintah sehingga tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian perjanjian kinerja (PK)

3. Perlu meningkatkan Disiplin SDM di Lingkungan Sekretariat DPRD Jember menjadi lebih profesional dan efektif dalam sistem administrasi melalui Rakor – Rakor sebagai upaya Evaluasi Kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 23 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebagai berikut :

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris DPRD Mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. Menyediakan dan mengkoordinasikan Kelompok Pakar, Tim Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Sekretaris DPRD, mempunyai fungsi ;
 - a. Penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bagian – bagian guna penyusunan laporan tahunan;

- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas tugas bagian secara terpadu;
 - c. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan;
 - d. Penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan;
 - e. Penyelenggaraan Analisa kebutuhan barang dan Analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
 - f. Pengkoordinasian pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang;
 - g. Pelaksanaan urusan administrasi umum, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, dan hubungan masyarakat.
 - h. Pelaksanaan penyediaan dan pengkoordinasian Kelompok Pakar, Tim Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi yang diperlukan DPRD;
 - i. Penyelenggaraan pakaian dinas dan atribut DPRD;
 - j. Pelaksanaan Medical Chek up DPRD;
 - k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- (3) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
- 1. Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum; dan
 - b) Kelompok jabatan Fungsional;
 - 2. Bagian Keuangan dan Pelaporan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Bagian Persidangan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang- Undangan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;

D. SUMBER DAYA MANUSIA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor:

188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil ekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah di *update* melalui SIMPEG sebanyak 31 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 59 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 28 orang atau 52,54 %.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	∑	SMA	D3	S1	S2	∑	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	-
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	4	0	0	2	2	3	0	0	0	1	2	3	-
2. Pengawas	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	-
3. Pelaksana	33	20	1	12	0	19	2	10	1	6	0	15	4
Jabatan Fungsional	20	0	0	13	7	7	0	0	0	6	1	5	2
Non ASN						16	1	5	1	9	0	12	4
Jumlah	59	20	1	29	9	47	3	15	2	24	3	37	10

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

E. SARANA PRASARANA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menempati gedung di Jl. Kalimantan no.86

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cukup memadai, karena dilaksanakan pemeliharaan dan juga pada

tahun anggaran 2024 terdapat belanja modal peralatan perlengkapan kantor. Adapun data sarana dan prasarana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Per 31 Desember 2024

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Meja Pimpinan	1 Set	Baik	1 Set
2	Kursi Pimpinan	6	Baik	6
3	Meja Anggota	24	Baik	24
4	Kursi Anggota	48	Baik	48
5	Meja Undangan untuk Eselon II	7	Baik	7
6	Kursi Undangan untuk Eselon II	33	Baik	33
7	Meja Undangan untuk Forkopimda Plus	7	Baik	7
8	Kursi Undangan untuk Forkopimda Plus	33	Baik	33
9	Audio Sound System	1 Paket	Baik	1 Paket
10	Kursi Undangan	200	Baik	200
11	Podium	1	Baik	1
12	Videotron	1	Baik	1
13	Komputer	40	Baik	40
14	Televisi Monitor	1	Baik	1
15	Kursi Sofa	6 set	Baik	6 set
16	Kendaraan Operasional R4	15	Baik	15
17	Kendaraan Operasional R2	12	Baik	12
18	SiDekat	1 Set	Baik	1 Set
19	Televisi	22	Baik	22
20	AC Standing	6	Baik	10
21	AC Split	56	Baik	65
22	Exhaust Fan	93	Baik	100
23	Meja kerja	264	Baik	275
24	Kursi kerja	264	Baik	275
25	Filling Kabinet	15	Baik	20
26	Printer/Scanner	40	Baik	40

27	Brankas	1	Baik	1
	Jumlah	1198	Baik	1245

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024

F. ANGGARAN Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki 2 Program, 15 Kegiatan, dan 51 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.527.467.359,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 52.566.553.339
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp 139.288.500
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 46.251.500
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Rp 20.951.600
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Rp 19.691.800
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 26.652.100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 25.741.500
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp 5.390.063.779
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.678.186.779
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 711.877.000
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 124.979.800
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 124.979.800
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 3.287.716.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 75.797.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan	Rp 1.605.337.500

	Perlengkapan Kantor	
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor	Rp 341.305.800
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 264.680.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp 49.661.700
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 950.934.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.940.353.657
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 56.300.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1.073.778.657
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 810.275.000
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 3.612.363.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 1.463.110.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 433.186.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 780.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 936.067.500
1.7	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 31.659.896.103
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp 30.615.186.103
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp 869.710.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp 175.000.000
1.8	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Rp 6.411.892.000
	Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp 6.411.892.000
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp 23.960.914.020
2.1	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp 600.112.500
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp 69.292.900
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Rp 192.345.400
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	Rp 338.474.200
2.2	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp 544.091.700
	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Rp 106.892.900
	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan	Rp 100.243.000

	Perubahan PPAS	
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Rp 128.889.000
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Rp 100.744.300
	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp 107.322.500
2.3	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 759.315.520
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp 89.300.000
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp 88.202.800
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp 89.819.940
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp 89.285.000
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Rp 83.489.700
	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rp 62.913.000
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp 89.331.580
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp 166.973.500
2.4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 1.607.275.500
	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp 595.101.200
	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp 362.807.600
	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp 426.679.700
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp 204.772.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp 17.915.000
2.5	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp 933.575.200
	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Rp 86.375.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp 27.050.200
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Rp 820.150.000
2.6	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 22.737.600
	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 22.737.600
2.7	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Rp 19.493.806.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp 19.493.806.000
	JUMLAH	Rp 76.527.467.359

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang *capable* di bidangnya;
2. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh;
3. Seringnya terjadi perubahan kebijakan serta peraturan perundang-undangan secara nasional maupun regional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, terutama kondisi kebijakan politik serta pembahasan ataupun penataan peraturan perundang-undangan menjadi kurang optimal, baik yang menjadi prioritas/usulan eksekutif maupun legislatif;
4. Reformasi birokrasi secara terus menerus membuka peluang bagi peningkatan profesionalisme aparat serta nilai-nilai demokratis, partisipatif, transparansi, akuntabel. Terbukanya peluang pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, bimtek dan sejenisnya;
5. Belum optimalnya informasi/dokumentasi/ publikasi & informasi kepada masyarakat atas kinerja DPRD dikarenakan Informasi dan dokumentasi DPRD masih belum update secara online;

6. Ketidaktepatan dan ketidakpastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu :

Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Tujuan RPJMD : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran RPJMD: Terintegrasinya Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda, Dan Anggaran Dalam Dokumen Rpjmd Dan Rkpd

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021-2026

Tujuan : Terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda, dan anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD

Indikator Tujuan : Tingkat integrasi program kinerja DPRD dalam dokumen RPJMD dan RKPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif	Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen			100%	100%	100%	100%

Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Anggaran Setwan DPRD						
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 2 : NILAI SAKIP

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah program DPRD yang masuk dalam dokumen anggaran Setwan DPRD dibagi seluruh program DPRD x 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program-program DPRD dalam indikator ini terdiri dari : program pembentukan perda, program pengawasan DPRD dan program pembentukan anggaran) pada tahun berkenaan • Dokumen anggaran setwan adalah adalah DPA tahun berkenaan 	Sekretariat DPRD	

Sumber : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah no: 175/23/35.09.2/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebelum Perubahan tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Rp 52.423.852.654 Sumber Dana : DAU
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Rp 23.960.914.020 Sumber Dana : DAU

Tugas dan Fungsi DPRD

Jumlah

Rp 76.384.766.674

2. Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Setelah Perubahan tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 52.566.553.339 Sumber Dana : DAU
 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp 23.960.914.020 Sumber Dana : DAU
- Jumlah** Rp 76.527.467.359

Perjanjian Kinerja mengalami perubahan dikarenakan pada tahun anggaran 2024 terdapat kekurangan anggaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu pada Belanja/Gaji/Upah untuk Tenaga Non ASN.

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

- a) Sasaran Strategis I : 76.527.467.359

Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp 52.566.553.339

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan Anggaran Rp 23.960.914.020

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 76.527.467.359 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)	7	8 (5/7*100%)
	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan	Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam	100%	100%	100%	100%	100%

Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Dokumen Anggaran Setwan DPRD						
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 1 (satu) indikator sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rata rata mencapai 100% dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan Progres positif. Dengan demikian maka secara umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang unsur pendukung/penunjang pemerintahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100%	100%	100%	100%

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren yang konstan/sama secara realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Tabel 3.4

(Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th.	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD		-	

Realisasi kinerja atas indikator sasaran Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya hubungan linier (Top Down) antara Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dengan Sekretariat DPRD Propinsi maupun dengan Setjen DPR RI dan hanya terdapat kesamaan dalam tupoksi.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung	Anggaran (23.960.914.020)	Realisasi (21.743.712.935,00)	Serapan Anggaran (90,75%)

	Sasaran			
Sasaran 1 :	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD			
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp 69.292.900	Rp 20.907.500,00	30,17%
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Rp 192.345.400	Rp 177.904.500,00	92,49%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	Rp 338.474.200	Rp 63.932.290,00	18,89%
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran			
	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Rp 106.892.900	Rp 94.026.000,00	87,96%
	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 100.243.000	Rp 0	0%
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Rp 128.889.000	Rp 121.388.000,00	94,18%
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Rp 100.744.300	Rp	0%
	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp 107.322.500	Rp 92.415.000,00	86,11%
	Kegiatan			

	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp 89.300.000	Rp 48.214.000,00	53,99%
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp 88.202.800	Rp 50.292.500,00	57,02%
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp 89.819.940	Rp 81.424.550,00	90,65%
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp 89.285.000	Rp 54.174.500,00	60,68%
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Rp 83.489.700	Rp 8.092.500,00	9,69%
	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rp 62.913.000	Rp 8.067.000,00	12,82%
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp 89.331.580	Rp 26.801.500,00	30,00%
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala	Rp 166.973.500	Rp 88.647.500,00	53,09%

	Daerah			
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD			
	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp 595.101.200	Rp 373.288.100,00	62,73%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp 362.807.600	Rp 362.460.000,00	99,90%
	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp 426.679.700	Rp 426.292.200,00	99,91%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraa n Hubungan Masyarakat	Rp 204.772.000	Rp 179.929.125,00	87,87%
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp 17.915.000	Rp 3.898.000,00	21,76%
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Rp 86.375.000	Rp 77.480.000,00	89,70%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp 27.050.200	Rp 8.282.000,00	30,62%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Rp 820.150.000	Rp 594.558.500,00	72,49%
	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 22.737.600	Rp 7.181.000,00	31,58%
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan	Rp 19.493.806.000	Rp 18.774.056.670,00	96,31%

	Tugas DPRD			
Total		Rp 23.960.914.020	Rp 21.743.712.935,00	90,75%

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya** adalah sebagai berikut :

1. Program: Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Sub Kegiatan : Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	69.292.900	20.907.500,00
Output	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1

Sub kegiatan ini merupakan salah satu tupoksi dewan bidang legislasi. Pada tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir anggota dewan periode 2019-2024 dimana untuk Propemperda periode 2019-2024 beberapa ada yang telah dibahas dan disahkan, akan tetapi ada juga yang dikembalikan pada pemerintah pusat seperti Perda RT/RW.



Sub Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	192.345.400	177.904.500,00
Output	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1

Sub kegiatan ini merupakan salah satu tupoksi dewan bidang legislasi, pada tahun 2024 ada tindaklanjut Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tahun sebelumnya yang baru mendapat persetujuan pemerintah pusat/propinsi pada tahun anggaran ini dan disahkan.



Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	338.474.200	63.932.290,00
Output	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Dokumen	4	1

Pada tahun 2024 untuk Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik, Bapemperda 2019-2024 tidak mengajukan naskah akademik Raperda yang baru dan hanya menindaklanjuti pembahasan serta pendampingan tenaga ahli naskah akademik tahun sebelumnya yaitu tentang Pondok Pesantren dikarenakan periode masa jabatannya yang akan segera berakhir.



Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran

Sub Kegiatan : Pembahasan KUA dan PPAS

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	106.892.900	94.026.000,00
Output	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1

Pembahasan KUA dan PPAS TA. 2025 merupakan fungsi dewan bidang anggaran, dilaksanakan dan disahkan oleh anggota dewan yang baru periode 2024-2029 pada masa Pj bupati.



Sub Kegiatan : Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	100.243.000	0
Output	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	0

Sub kegiatan ini merupakan tupoksi dewan bidang anggaran. Akan tetapi Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak terlaksana dikarenakan masa transisi berakhirnya periode anggota dewan 2019-2024 dan telah lewat waktu dari jadwal pembahasan.

Sub Kegiatan : Pembahasan APBD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	128.889.000	121.388.000,00
Output	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	1

Pembahasan APBD TA. 2025 merupakan salah satu fungsi dewan bidang anggaran, dilaksanakan dan disahkan oleh anggota dewan yang baru periode 2024-2029.



Sub Kegiatan : Pembahasan APBD Perubahan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	100.744.300	0
Output	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Peruba	Dokumen	1	0

Sub kegiatan ini merupakan tupoksi dewan bidang anggaran. Akan tetapi Pembahasan APBD Perubahan TA. 2024 tidak terlaksana dikarenakan masa transisi berakhirnya periode anggota dewan 2019-2024 dan telah lewat waktu dari jadwal pembahasan.

Sub Kegiatan : Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	107.322.500	92.415.000,00
Output	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1

Pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan proses melaporkan anggaran daerah kepada DPRD. Pertanggungjawaban ini dilakukan oleh kepala daerah, seperti gubernur, walikota, atau bupati melalui Rapat Paripurna. Pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari mekanisme

pengelolaan keuangan daerah. Mekanisme ini dilakukan setelah proses penyusunan, persetujuan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD



Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	89.300.000	48.214.000,00
Output	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	12	12

Sub kegiatan ini merupakan tupoksi dewan dalam hal pengawasan. Pada Tahun Anggaran 2024 ini ada beberapa agenda-agenda rapat yang harus dilakukan penjadwalan ulang dikarenakan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan dewan.



Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	88.202.800	50.292.500,00
Output	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	12	12

Sub kegiatan ini merupakan tupoksi dewan dalam hal pengawasan. Pada Tahun Anggaran 2024 ini ada beberapa agenda-agenda rapat yang harus dilakukan penjadwalan ulang dikarenakan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan dewan



Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	89.819.940	81.424.550,00
Output	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	12

Sub kegiatan ini merupakan tupoksi dewan dalam hal pengawasan. Pada Tahun Anggaran 2024 ini ada beberapa agenda-agenda rapat yang harus dilakukan penjadwalan ulang dikarenakan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan dewan



Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	89.285.000	54.174.500,00
Output	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	12	12

Sub kegiatan ini merupakan tupoksi dewan dalam hal pengawasan. Pada Tahun Anggaran 2024 ini ada beberapa agenda-agenda rapat yang harus dilakukan penjadwalan ulang dikarenakan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan dewan



Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	83.489.700	8.092.500,00
Output	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	12	12

Sub kegiatan ini merupakan tupoksi dewan dalam hal pengawasan. Pada Tahun Anggaran 2024 ini ada beberapa agenda-agenda rapat yang harus dilakukan penjadwalan ulang dikarenakan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan dewan



Sub Kegiatan : Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	62.913.000	8.067.000,00
Output	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	12	12

Sub kegiatan ini merupakan tupoksi dewan dalam hal pengawasan terutama setelah adanya Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengetahui apa saja yang menjadi catatan atau temuan dan bagaimana tindaklanjut pemerintah kabupaten dalam menyingkapi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan



Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Anggaran

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	89.331.580	26.801.500,00
Output	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	12	12

Sub kegiatan ini merupakan tupoksi dewan dalam hal pengawasan dan dibahas dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan



Sub Kegiatan : Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	166.973.500	88.647.500,00
Output	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rekomendasi	1	1

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan dan dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD untuk menetapkan Keputusan DPRD. Keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.



Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan : Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	362.807.600	362.460.000,00
Output	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	4	4

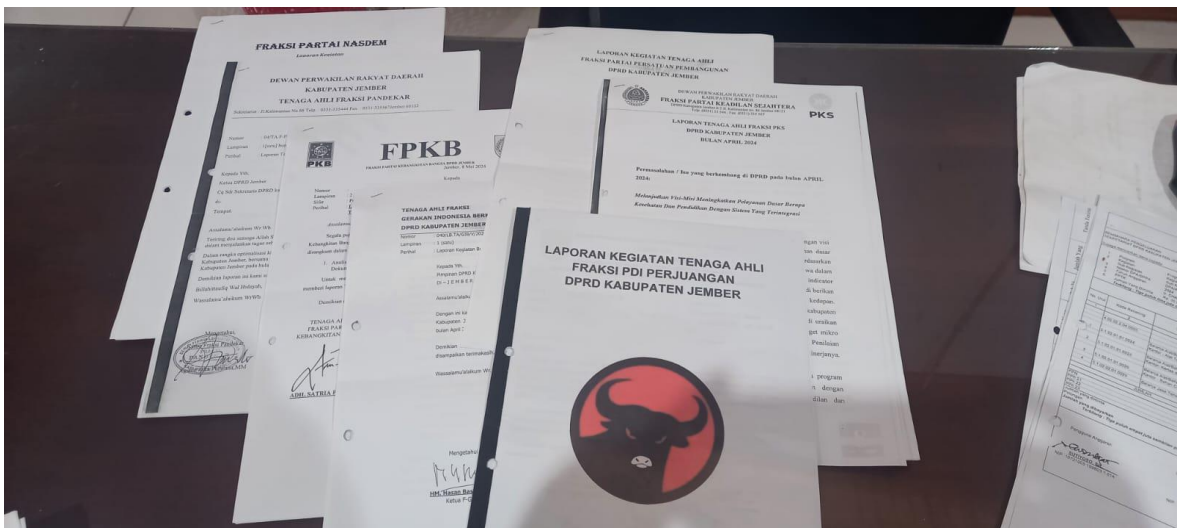
Penyediaan tenaga ahli merupakan salah satu dari tupoksi Sekretariat DPRD untuk membantu pelaksanaan tugas dari DPRD.



Sub Kegiatan : Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	426.679.700	426.292.200,00
Output	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	7	7

Penyediaan tenaga ahli merupakan salah satu dari tupoksi Sekretariat DPRD untuk membantu pelaksanaan tugas dari DPRD.



Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	204.772.000	179.929.125,00
Output	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12	12

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat lebih banyak pada ceremonial kegiatan Pimpinan DPRD dan penerimaan tamu serta unjuk rasa



Sub Kegiatan :

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	17.915.000	3.898.000,00
Output	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	12	12

Penyusunan Program Kerja DPRD digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan program/kegiatan DPRD selama 1 (satu) tahun ke depan, akan

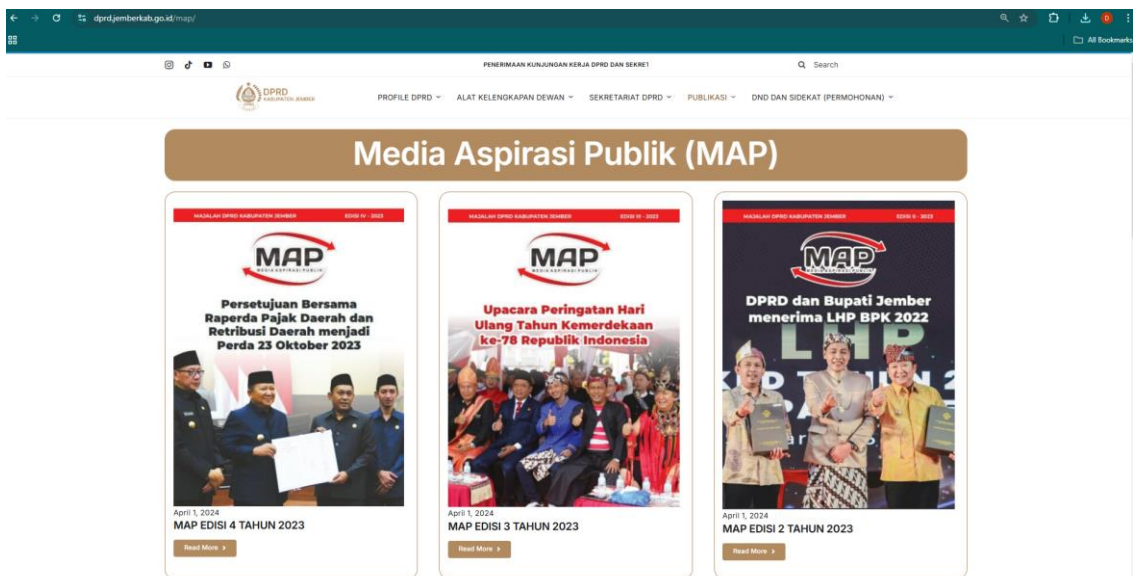
tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perubahan dikarenakan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan DPRD



Sub Kegiatan : Publikasi dan Dokumentasi DPRD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	595.101.200	373.288.100,00
Output	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	12	12

Sub Kegiatan tersebut mengarah pada penyebarluasan informasi kepada masyarakat baik melalui berita online maupun majalah



Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sub Kegiatan : Kunjungan Kerja dalam Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	86.375.000	77.480.000,00
Output	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	12	12

Dilaksanakan berdasarkan hearing/rapat dengar pendapat/serap aspirasi melalui komisi-komisi/surat pengaduan dengan sidak ke lokasi/tempat



Sub Kegiatan : Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	27.050.200	8.282.000,00
Output	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	1

Dilaksanakan berdasarkan hearing/rapat dengar pendapat/serap aspirasi



Sub Kegiatan : Pelaksanaan Reses

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	820.150.000	594.558.500,00
Output	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	1

Merupakan amanah undang-undang dan sebagai salah satu cara untuk penyusunan Pokir. Pelaksanaan reses hanya dilaksanakan oleh anggota DPRD periode 2019-2024



Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Sub Kegiatan : Pengawasan Kode Etik DPRD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	22.737.600	7.181.000,00
Output	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	12	12

Sub kegiatan ini sebagai salah satu fungsi control serta pengawasan terhadap tupoksi pimpinan dan anggota DPRD



Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	19.493.806.000	18.774.056.670,00
Output	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12	12

Dilaksanakan berdasarkan hearing/rapat dengar pendapat/serap aspirasi melalui komisi-komisi/surat pengaduan dengan melaksanakan study banding/study tiru ke daerah lain atau pemerintah pusat/K/L untuk mendapatkan pengetahuan/kejelasan serta penyelesaian sebuah permasalahan.



D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjumlah 47 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 75.145.469.259 , melaksanakan 2 program 15 kegiatan dan 51 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen	100 %	90,69%	Efisien

Pembangunan Daerah Lain-Lainnya			
---------------------------------	--	--	--

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: 1. Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya dapat dikategorikan efisien karena 100% capaian kinerja (lebih besar) daripada 90,69% serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (**keberhasilan / kegagalan**) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 1.Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen						

Pembangunan Daerah Lain-Lainnya						
Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100%					
Rata rata capaian	100%	√				

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

- Penyebab keberhasilan/ kegagalan antara lain :
 1. Tantangan dalam harmonisasi peraturan daerah dengan kebijakan nasional.
 2. Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran melalui implementasi sistem berbasis teknologi informasi.
 3. Kolaborasi antara Sekretariat DPRD, DPRD, eksekutif, dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.
 4. Komitmen dan koordinasi Pemerintah daerah untuk melaksanakan jadwal Program kegiatan yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah Menyediakan layanan administratif yang lebih efektif dan efisien kepada DPRD untuk menunjang

pelaksanaan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi serta meningkatkan kolaborasi antara Sekretariat DPRD, DPRD, eksekutif, dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan

- Rencana perbaikan kedepan Sekretariat DPRD antara lain:
 1. Optimalisasi perencanaan program berbasis hasil (result-oriented).
 2. Peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran.
 3. Penguatan koordinasi internal dan eksternal untuk mendukung pelaksanaan tugas.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 76.527.467.359 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 75.145.469.259 terealisasi sebesar Rp 68.150.727.916,- (90,69%)
2. Belanja Modal sebesar Rp. 1.381.998.100 terealisasi sebesar Rp. 1.250.835.000,- (90,51%)

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 52.566.553.339	Rp 47.657.849.981,00	90,66%
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp 139.288.500	Rp 69.711.300,00	50,05%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 46.251.500	Rp 38.344.300,00	82,90%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Rp 20.951.600	Rp 10.226.350,00	48,81%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Rp 19.691.800	Rp 10.358.500,00	52,60%

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 26.652.100	Rp 6.660.350,00	24,99%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 25.741.500	Rp 4.121.800,00	16,01%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp 5.390.063.779	Rp 5.087.033.204,00	94,38%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.678.186.779	Rp 4.480.526.694,00	95,77%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 711.877.000	Rp 606.506.510,00	85,20%
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 124.979.800	Rp 93.645.456,00	74,93%
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 124.979.800	Rp 93.645.456,00	74,93%
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 3.287.716.000	Rp 2.957.900.749,00	89,97%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 75.797.000	Rp 67.615.650,00	89,21%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.605.337.500	Rp 1.450.071.500,00	90,33%
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor	Rp 341.305.800	Rp 334.245.200,00	97,93%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 264.680.000	Rp 219.757.710,00	83,03%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 49.661.700	Rp 30.049.200,00	60,51%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 950.934.000	Rp 856.161.489,00	90,03%
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.940.353.657	Rp 1.457.681.269,00	75,12%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 56.300.000	Rp 29.233.000,00	51,92%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1.073.778.657	Rp 665.648.047,00	61,99%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 810.275.000	Rp 762.800.222,00	94,14%
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 3.612.363.500	Rp 2.130.727.474,00	58,98%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Rp 1.463.110.000	Rp 904.216.422,00	61,80%

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 433.186.000	Rp 263.550.052,00	60,84%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 780.000.000	Rp 673.278.000,00	86,32%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 936.067.500	Rp 289.683.000,00	30,95%
1.7	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 31.659.896.103	Rp 31.149.954.029,00	98,39%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp 30.615.186.103	Rp 30.194.291.029,00	98,63%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp 869.710.000	Rp 829.263.000,00	95,35%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp 175.000.000	Rp 126.400.000,00	72,23%
1.8	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Rp 6.411.892.000	Rp 4.711.196.500,00	73,48%
	Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp 6.411.892.000	Rp 4.711.196.500,00	73,48%
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp 23.960.914.020	Rp 21.743.712.935,00	90,75%
2.1	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp 600.112.500	Rp 262.744.290,00	43,78%
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp 69.292.900	Rp 20.907.500,00	30,17%
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Rp 192.345.400	Rp 177.904.500,00	92,49%
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	Rp 338.474.200	Rp 63.932.290,00	18,89%
2.2	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp 544.091.700	Rp 307.829.000,00	56,58%
	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Rp 106.892.900	Rp 94.026.000,00	87,96%
	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 100.243.000	Rp 0	0%
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Rp 128.889.000	Rp 121.388.000,00	94,18%
	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Rp 100.744.300	Rp 0	0%
	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp 107.322.500	Rp 92.415.000,00	86,11%
2.3	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 759.315.520	Rp 365.714.050,00	48,16%
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp 89.300.000	Rp 48.214.000,00	53,99%
	Sub Kegiatan Pengawasan	Rp 88.202.800	Rp 50.292.500,00	57,02%

	Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp 89.819.940	Rp 81.424.550,00	90,65%
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp 89.285.000	Rp 54.174.500,00	60,68%
	Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Rp 83.489.700	Rp 8.092.500,00	9,69%
	Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rp 62.913.000	Rp 8.067.000,00	12,82%
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp 89.331.580	Rp 26.801.500,00	30,00%
	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp 166.973.500	Rp 88.647.500,00	53,09%
2.4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 1.607.275.500	Rp 1.345.867.425,00	83,74%
	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp 595.101.200	Rp 373.288.100,00	62,73%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp 362.807.600	Rp 362.460.000,00	99,90%
	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp 426.679.700	Rp 426.292.200,00	99,91%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp 204.772.000	Rp 179.929.125,00	87,87%
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp 17.915.000	Rp 3.898.000,00	21,76%
2.5	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp 933.575.200	Rp 680.320.500,00	72,87%
	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Rp 86.375.000	Rp 77.480.000,00	89,70%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp 27.050.200	Rp 8.282.000,00	30,62%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Rp 820.150.000	Rp 594.558.500,00	72,49%
2.6	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 22.737.600	Rp 7.181.000,00	31,58%
	Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 22.737.600	Rp 7.181.000,00	31,58%
2.7	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Rp 19.493.806.000	Rp 18.774.056.670,00	96,31%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp 19.493.806.000	Rp 18.774.056.670,00	96,31%
	JUMLAH	Rp 76.527.467.359	Rp 69.401.562.916,00	90,69%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah satu Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak satu indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi.

Terkait dengan hal tersebut, kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap pencapaian target adalah :

1. Tantangan dalam menjaga komunikasi yang efektif di tengah dinamika politik lokal.
2. Pelaksanaan rencana kerja DPRD dan kegiatan – kegiatan DPRD yang bersifat Tentatif sehingga perlu penyesuaian
3. Perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan anggaran, aturan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
4. Tuntutan peningkatan dan ketepatan kualitas pelayanan yang dibutuhkan anggota dan pimpinan DPRD yang cukup tinggi sehingga diperlukan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada
5. Besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai badan legislatif, badan pengawasan dan anggaran maka diperlukan optimalisasi dalam pendayaan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD
6. Adanya penempatan program dan kegiatan yang kurang tepat memerlukan penataan kembali.

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan kolaborasi antara Sekretariat DPRD, DPRD, eksekutif, dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.
2. Komitmen dan koordinasi Pemerintah daerah untuk melaksanakan jadwal Program kegiatan yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah
3. Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan dan Perundang – undangan.
4. Perlu mewujudkan peningkatan pelayanan prima secara cepat dan akurat seperti tersusunnya produk kebijakan pemerintah yang akuntabel, serta adanya dukungan dari anggota dan pimpinan DPRD

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Kooordinasi dan komitmen bersama antara Pemerintah daerah yaitu DPRD dan Kepala Daerah dalam evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan serta kebijakan
2. Meningkatkan pembinaan administrasi, meningkatkan motivasi, disiplin, moral dan etos kerja aparatur dalam mewujudkan pemerintahan

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

**Matriks Rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
Tahun 2021 - 2026**

Tujuan : Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya

Sasaran : Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Jember

Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jember (IKM)

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir restra Periode Tahun 2026	
				2021	Rp	2022	Rp	2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.02.01	PROGRAM PENLUIANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Realisasi Anggaran		100%	43.258.631,518	100%	45.670.949,541	100%	48.217.717,609	100%	50.918.146,140	100%	53.782.550,382	100%	56.822.826,487	100%	298.667.419,658
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Dokumen	200.800,500	7 Dokumen	216.945,525	7 Dokumen	221.492,801	7 Dokumen	232.567,441	7 Dokumen	244.195,813	7 Dokumen	256.405,604	42 Dokumen	1.366.507,685
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan-Perangkat Daerah		3 dok	67.502,500	3 dok	70.877,625	3 dok	74.421,506	3 dok	78.142,582	3 dok	82.049,711	3 dok	86.152,196	18 dok	459.146,120
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dok	32.146,000	1 dok	33.753,300	1 dok	35.440,985	1 dok	37.213,013	1 dok	39.073,664	1 dok	41.027,347	6 dok	238.054,289
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dok	32.746,000	1 dok	34.363,300	1 dok	36.102,465	1 dok	37.907,588	1 dok	39.802,968	1 dok	41.793,116	6 dok	222.725,427
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 dok	33.146,000	1 dok	34.803,300	1 dok	36.543,405	1 dok	38.370,628	1 dok	40.289,170	1 dok	42.303,629	6 dok	225.456,202
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dok	35.360,000	1 dok	37.128,000	1 dok	38.984,400	1 dok	40.933,620	1 dok	42.980,301	1 dok	45.129,216	6 dok	240.515,637
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan		12 laporan	5.295.720,832	12 laporan	5.798.888,825	12 laporan	6.353.018,963	12 laporan	6.966.213,611	12 laporan	7.626.721,267	12 laporan	8.358.460,875	72 laporan	40.393.808,513
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		35 ts	4.785.828,932	37 ts	5.264.411,825	38 ts	5.790.853,008	39 ts	6.369.938,308	39 ts	7.006.932,139	39 ts	7.707.625,353	227 ts	36.925.589,566
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dok	509.902,000	12 dok	535.397,100	12 dok	562.166,955	12 dok	590.275,303	12 dok	619.789,068	12 dok	650.779,521	72 dok	3.468.308,947
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		5 laporan	4.537.830,500	5 laporan	4.777.547,625	5 laporan	5.046.424,376	5 laporan	5.367.345,595	5 laporan	5.738.607,875	5 laporan	6.167.138,269	25 laporan	30.926.793,640
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	150.085,500	1 paket	157.589,775	1 paket	165.469,264	1 paket	173.742,727	1 paket	182.429,863	1 paket	191.551,356	5 paket	1.020.868,485
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 paket	2.661.675,000	5 paket	2.794.758,750	5 paket	2.934.496,688	5 paket	3.081.221,522	5 paket	3.235.282,594	5 paket	3.397.046,729	25 paket	18.304.481,285
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	129.476,000	1 paket	135.949,800	1 paket	142.747,290	1 paket	149.884,655	1 paket	157.378,887	1 paket	165.247,832	5 paket	880.684,463
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		250 dok	85.500,000	300 dok	102.600,000	300 dok	107.730,000	300 dok	113.116,500	300 dok	118.772,325	300 dok	124.710,941	1.750 dok	652.429,766

4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36 laporan	1,511,094,000	36 laporan	1,580,648,700	36 laporan	1,665,961,135	36 laporan	1,749,293,150	36 laporan	1,830,744,211	36 laporan	1,928,581,411	376 laporan	10,278,329,620
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 laporan	947,170,000	3 laporan	894,528,500	3 laporan	1,044,254,905	3 laporan	1,096,467,671	3 laporan	1,151,291,053	3 laporan	1,208,855,608	18 laporan	6,442,567,750
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	122,570,000	12 laporan	128,698,500	12 laporan	135,133,425	12 laporan	141,890,096	12 laporan	148,984,601	12 laporan	156,433,821	72 laporan	833,710,453
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	490,600,000	12 laporan	515,130,000	12 laporan	540,886,500	12 laporan	567,930,825	12 laporan	596,327,360	12 laporan	626,143,735	72 laporan	3,337,018,426
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	324,000,000	12 laporan	350,700,000	12 laporan	368,235,000	12 laporan	386,646,750	12 laporan	405,979,083	12 laporan	426,278,043	72 laporan	2,271,838,879
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 laporan	6,656,107,658	3 laporan	6,988,913,041	3 laporan	7,238,358,680	3 laporan	7,705,076,628	3 laporan	8,096,548,459	3 laporan	8,495,067,482	18 laporan	41,537,884,808
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		8 Unit	559,535,000	8 Unit	587,511,750	8 Unit	616,887,338	8 Unit	647,731,704	8 Unit	680,118,290	8 Unit	714,124,204	8 Unit	749,830,414
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perlakuan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya		22 Unit	246,495,000	22 Unit	258,819,750	22 Unit	271,760,738	22 Unit	285,348,774	22 Unit	299,616,213	22 Unit	314,587,024	22 Unit	1,676,637,499
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		50 unit	100,000,000	50 unit	105,000,000	50 unit	110,250,000	50 unit	115,762,500	50 unit	121,550,625	50 unit	127,628,150	300 unit	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 Unit	223,385,500	100 Unit	234,554,775	100 Unit	246,282,514	100 Unit	258,596,639	100 Unit	271,526,471	100 Unit	285,102,795	600 Unit	1,539,448,695
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Gedung	5,526,692,158	1 Gedung	5,803,026,766	1 Gedung	6,093,178,104	1 Gedung	6,397,837,009	1 Gedung	6,717,728,860	1 Gedung	7,053,615,303	1 Gedung	37,592,078,200
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Keajahteraan DPRD	Jumlah Laporan Keuangan dan Keajahteraan DPR		3 laporan	24,725,243,928	3 laporan	25,961,586,134	3 laporan	27,259,581,431	3 laporan	28,622,568,582	3 laporan	30,053,688,527	3 laporan	31,556,372,954	18 laporan	168,178,952,466
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		50 orang	23,819,043,800	50 orang	25,009,996,124	50 orang	26,260,495,931	50 orang	27,573,520,727	50 orang	28,952,196,764	50 orang	30,399,806,603	30 orang	162,015,060,075
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		4 paket	756,200,000	4 paket	794,010,000	4 paket	833,710,500	4 paket	875,396,025	4 paket	919,165,820	4 paket	965,124,110	24 paket	5,143,606,469
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up		50 orang	150,000,000	50 orang	157,500,000	50 orang	165,375,000	50 orang	173,643,750	50 orang	182,325,938	50 orang	191,442,234	300 orang	1,020,285,922
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Administrasi dan Fasilitas DPRD		1 laporan	893,048,000	1 laporan	937,786,400	1 laporan	984,585,420	1 laporan	1,033,814,691	1 laporan	1,085,505,426	1 laporan	1,139,780,697	6 laporan	6,074,434,633
4.02.01.2.16.03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		1 laporan	893,048,000	1 laporan	937,786,400	2 laporan	984,585,420	2 laporan	1,033,814,691	2 laporan	1,085,505,426	2 laporan	1,139,780,697	10 laporan	6,074,434,633
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		100%	35,873,983,889	100%	38,476,542,960	100%	40,108,467,220	100%	43,455,875,317	100%	45,185,995,883	100%	47,467,328,978	100%	250,667,314,180
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	DAI INDIKATORMYA		2 Sub Kegiatan	3,667,529,000	4 Sub Kegiatan	4,666,287,450	4 Sub Kegiatan	4,343,458,723	2 Sub Kegiatan	4,786,774,359	3 Sub Kegiatan	4,457,804,422	2 Sub Kegiatan	4,980,798,643	22 Sub Kegiatan	26,902,745,595
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		1 Propemperda	270,024,000	1 Propemperda	283,525,200	1 Propemperda	297,701,460	1 Propemperda	312,586,533	1 Propemperda	328,215,860	1 Propemperda	344,626,653	6 Propemperda	1,836,679,705
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		4 Kegiatan	2,108,716,000	4 Kegiatan	2,214,151,800	4 Kegiatan	2,324,859,390	4 Kegiatan	2,441,302,360	4 Kegiatan	2,563,157,477	4 Kegiatan	2,691,315,351	24 Kegiatan	14,343,302,378

4.02.02.2.01.03	Penyenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyenggaraan Kajian Perundang-Undangan	0	0	2 Produk hukum daerah	300,000,000	2 Produk hukum daerah	300,000,000	0	0	0	0	2 Produk hukum daerah	300,000,000	6 Produk hukum daerah yang dikaji	900,000,000
4.02.02.2.01.04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Facilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	4 Penjelasan/Keterangan/Naskah Akademik Raporda Prakarsa DPRD	1,288,789,000	4 Penjelasan/Keterangan/Naskah Akademik Raporda Prakarsa DPRD	1,353,328,450	4 Penjelasan/Keterangan/Naskah Akademik Raporda Prakarsa DPRD	1,420,889,872	4 Penjelasan/Keterangan/Naskah Akademik Raporda Prakarsa DPRD	1,491,934,366	4 Penjelasan/Keterangan/Naskah Akademik Raporda Prakarsa DPRD	1,566,531,084	4 Penjelasan/Keterangan/Naskah Akademik Raporda Prakarsa DPRD	1,644,857,639	20 Penjelasan/Keterangan/Naskah Akademik Raporda Prakarsa DPRD	8,766,230,412
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Terlaksananya Tata Tertib DPRD	0	0	1 Peraturan DPRD dg Tata Tertib DPRD	515,382,000	0	0	1 Peraturan DPRD dg Tata Tertib DPRD	541,151,100	0	0	0	0	2 Peraturan DPRD dg Tata Tertib DPRD	1,056,533,100
4.02.02.2.02	Penyusunan Kebijakan Anggaran	DISKONKATORWA	7 Kebijakan Anggaran	3,428,156,800	8 Kebijakan Anggaran	3,788,972,368	8 Kebijakan Anggaran	4,817,378,782	8 Kebijakan Anggaran	4,258,412,844	8 Kebijakan Anggaran	4,513,917,738	8 Kebijakan Anggaran	4,794,752,794	43 Kebijakan Anggaran	24,792,582,509
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	2 Nota Kesepakatan	664,868,000	2 Nota Kesepakatan	704,760,080	2 Nota Kesepakatan	747,045,685	2 Nota Kesepakatan	791,898,426	2 Nota Kesepakatan	839,380,531	2 Nota Kesepakatan	889,743,363	12 Nota Kesepakatan	4,637,606,085
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Nota Kesepakatan	407,967,000	2 Nota Kesepakatan	432,445,020	2 Nota Kesepakatan	458,391,721	2 Nota Kesepakatan	485,895,224	2 Nota Kesepakatan	515,048,938	2 Nota Kesepakatan	545,951,874	12 Nota Kesepakatan	2,845,699,778
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	1 Perda	939,802,000	1 Perda	996,190,120	1 Perda	1,055,961,527	1 Perda	1,119,319,219	1 Perda	1,186,478,372	1 Perda	1,257,667,074	6 Perda	6,555,418,312
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	1 Perda	491,107,000	1 Perda	520,573,420	1 Perda	551,807,825	1 Perda	584,916,295	1 Perda	620,011,272	1 Perda	657,211,949	6 Perda	3,425,627,761
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	0	0	1 laporan	156,127,000	1 laporan	165,494,820	1 laporan	175,424,297	1 laporan	185,949,755	1 laporan	197,106,740	5 laporan	880,102,413
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Perda	924,412,000	1 Perda	979,876,720	1 Perda	1,038,869,323	1 Perda	1,100,969,483	1 Perda	1,167,048,852	1 Perda	1,237,071,783	6 Perda	6,448,068,160
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	8 Laporan	5,825,044,800	8 Laporan	6,174,546,648	8 Laporan	6,545,018,428	8 Laporan	6,907,728,665	8 Laporan	7,253,983,841	8 Laporan	7,795,232,871	48 Laporan	40,631,537,296
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	12 laporan	2,581,870,000	12 laporan	2,736,782,200	12 laporan	2,900,989,132	12 laporan	3,075,048,480	12 laporan	3,259,551,389	12 laporan	3,455,124,472	72 laporan	18,009,365,673
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 laporan	546,642,000	12 laporan	579,440,520	12 laporan	614,206,951	12 laporan	651,059,368	12 laporan	690,122,930	12 laporan	731,530,306	72 laporan	3,813,002,076
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 laporan	586,542,000	12 laporan	621,734,520	12 laporan	659,038,591	12 laporan	698,580,907	12 laporan	740,495,761	12 laporan	784,925,507	72 laporan	4,091,317,286
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 laporan	587,525,400	12 laporan	622,776,924	12 laporan	660,143,539	12 laporan	699,752,152	12 laporan	741,737,281	12 laporan	786,241,518	72 laporan	4,098,176,814
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 laporan	570,250,400	12 laporan	604,571,424	12 laporan	640,845,709	12 laporan	679,296,452	12 laporan	720,054,239	12 laporan	763,257,493	72 laporan	3,978,375,718
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 laporan	351,720,200	1 laporan	374,943,412	1 laporan	397,440,017	1 laporan	421,298,418	1 laporan	446,583,803	1 laporan	473,357,419	6 laporan	2,467,311,068
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 laporan	156,127,000	4 laporan	165,494,820	4 laporan	175,424,297	4 laporan	185,949,755	4 laporan	197,106,740	4 laporan	208,933,145	24 laporan	1,089,035,557

4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Keputusan DPRD	442,207,000	1 Keputusan DPRD	468,803,020	1 Keputusan DPRD	496,931,201	1 Keputusan DPRD	526,747,073	1 Keputusan DPRD	558,351,898	1 Keputusan DPRD	591,853,012	6 Keputusan DPRD	1,084,953,204
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD	7 laporan	6,674,455,000	7 laporan	7,088,177,758	7 laporan	7,358,586,638	7 laporan	8,581,448,534	7 laporan	8,254,518,881	7 laporan	8,667,244,804	42 laporan	46,524,429,587
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Orientasi DPRD	0	0	0	0	0	0	1 Kegiatan	700,000,000	0	0	0	0	1 Kegiatan	700,000,000
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Kegiatan	3,112,582,000	4 Kegiatan	3,268,211,300	4 Kegiatan	3,431,621,655	4 Kegiatan	3,603,202,738	4 Kegiatan	3,783,362,875	4 Kegiatan	3,972,531,018	24 Kegiatan	21,171,511,286
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Laporan Hasil Publikasi dan Dokumentasi Dewan	8 Kegiatan	1,223,860,000	8 Kegiatan	1,285,053,000	8 Kegiatan	1,349,305,650	9 Kegiatan	1,551,701,498	8 Kegiatan	1,629,286,572	8 Kegiatan	1,710,750,901	49 Kegiatan	8,749,957,621
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7 orang	428,944,000	7 orang	461,941,300	7 orang	485,038,200	7 orang	509,290,172	7 orang	534,754,682	7 orang	561,492,416	42 orang	2,992,460,730
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang Tenaga Ahli Fraksi	7 orang	320,444,000	7 orang	346,966,200	7 orang	364,314,510	7 orang	382,530,236	7 orang	401,656,747	7 orang	421,729,585	42 orang	2,247,651,277
4.02.02.2.04.06	Penyenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitas Hubungan Masyarakat	9 Kag	1,434,920,000	9 Kag	1,485,666,000	9 Kag	1,559,949,300	9 Kag	1,637,946,705	9 Kag	1,719,844,103	9 Kag	1,805,826,308	54 Kag	9,624,162,477
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen Rencana Kerja DPRD	152,705,000	1 Program Kerja DPRD	160,340,250	1 Program Kerja DPRD	168,357,263	1 Program Kerja DPRD	176,775,126	1 Program Kerja DPRD	185,613,882	1 Program Kerja DPRD	194,894,576	6 Program Kerja DPRD	1,038,686,096
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	75 kali	4,928,584,000	75 kali	5,224,288,048	75 kali	5,537,756,982	75 kali	5,876,022,491	75 kali	6,222,222,745	75 kali	6,596,557,179	450	24,378,442,329
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja DPRD	72 kali	625,000,000	72 kali	662,500,000	72 kali	702,250,000	72 kali	744,385,000	72 kali	789,048,100	72 kali	836,380,886	432 kali	4,259,574,086
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Pokir	288,677,000	1 Pokir	305,997,620	1 Pokir	324,357,477	1 Pokir	343,818,926	1 Pokir	364,448,061	1 Pokir	386,314,945	6 Pokir	2,011,614,029
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Revisi	Jumlah Laporan Revisi DPRD yang Disusun	3 laporan	4,034,907,000	3 kali	4,255,801,420	3 kali	4,511,149,505	2 kali	4,781,818,476	3 kali	5,068,727,584	3 kali	5,372,851,239	18 kali	28,005,255,224
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Penyusunan Kode Etik, Tata Beracara dan Pengawasan DPRD	2 laporan	856,125,000	1 tahun	377,258,750	1 tahun	396,122,738	1 tahun	415,928,874	1 tahun	1,001,191,318	1 tahun	458,561,584	6 tahun	3,499,199,264
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Peraturan DPRD	490,840,000	0	0	0	0	0	0	2 Peraturan DPRD	564,466,000	0	0	4 Peraturan DPRD	1,055,306,000
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Pengaduan	358,295,000	2 Pengaduan	377,259,750	2 Pengaduan	396,122,738	2 Pengaduan	415,928,874	2 Pengaduan	436,725,318	2 Pengaduan	458,561,584	10 Pengaduan	2,441,893,264
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi hasil Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Peninjauan Kerja Sama Daerah	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	212,000,000	2 Dokumen	224,720,000	2 Dokumen	238,203,200	2 Dokumen	252,495,200	2 Dokumen	267,645,116	12 laporan	1,105,062,708
4.02.02.2.07.01	Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Peninjauan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan hasil Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Peninjauan Kerja Sama Daerah	1 laporan	125,000,000	1 laporan	132,500,000	1 laporan	140,450,000	1 laporan	148,877,000	1 laporan	157,809,600	1 laporan	167,278,197	6 laporan	871,914,817
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Laporan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1 laporan	75,000,000	1 laporan	79,500,000	1 laporan	84,270,000	1 laporan	89,325,200	1 laporan	94,585,772	1 laporan	100,388,918	6 laporan	523,348,890
4.02.02.2.08	Fasilitas Tugas DPRD	Jumlah Laporan Alat Kelengkapan dan Kewajiban yang Disusun	4 laporan	16,460,000,000	4 laporan	17,624,000,000	4 laporan	18,685,440,000	4 laporan	19,746,560,400	4 laporan	20,807,680,800	4 laporan	21,868,801,200	24 laporan	72,542,312,791
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 laporan	10,000,000,000	1 laporan	10,600,000,000	1 laporan	11,200,000,000	1 laporan	11,800,000,000	1 laporan	12,400,000,000	1 laporan	13,000,000,000	6 laporan	69,753,335,276
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD	1 laporan	100,000,000	1 laporan	106,000,000	1 laporan	112,000,000	1 laporan	118,000,000	1 laporan	124,000,000	1 laporan	130,000,000	6 laporan	697,511,854
4.02.02.2.08.03	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Masyarakat	Jumlah laporan Pelaksanaan Tugas Badan Masyarakat	12 laporan	150,000,000	12 laporan	158,000,000	12 laporan	166,500,000	12 laporan	175,000,000	12 laporan	183,500,000	12 laporan	192,000,000	72 laporan	1,046,297,783
4.02.02.2.08.04	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	12 laporan	150,000,000	12 laporan	158,000,000	12 laporan	166,500,000	12 laporan	175,000,000	12 laporan	183,500,000	12 laporan	192,000,000	72 laporan	1,046,297,783
JUMLAH TOTAL				79,229,924,518	84,347,492,531	88,326,184,829	94,373,221,457	98,968,546,045	104,289,354,466	109,800,000,000	114,900,000,000	120,500,000,000	126,100,000,000	131,700,000,000	137,300,000,000	569,334,733,845



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jl. Kalimantan No. 86 ☎ (0331) 335444 – 335567 Jember - 68120

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	Terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA, dan anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD	Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD

RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA, dan anggaran dalam	Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan	Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam	100%	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan	Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	7 keg	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dok	69.292.900

dokumen RPJMD dan RKPD		Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Dokumen Anggaran Setwan DPRD		DPRD						
								Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 dok	192.345.400
								Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 dok	338.474.200
					Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dok	106.892.900
								Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dok	100.243.000
								Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dok	128.889.000
								Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dok	100.744.300

								Pembahasan Pertanggungjaw aban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban	1 dok	107.322.50 0
					Kegiatan Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 lap	89.300.000
								Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 lap	88.202.800
								Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 lap	89.819.940
								Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 lap	89.285.000
								Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 lap	83.489.700
								Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	12 Dok	62.913.000

							Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		
							Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dok	89.331.580
							Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dok	166.973.500
					Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dok	595.101.200
							Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4 org	362.807.600
							Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang Tenaga Ahli Fraksi	7 org	426.679.700
							Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan hubungan masyarakat	12 Dok	204.772.000
							Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dok	17.915.000
							Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Lap	86.375.000
					Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Dok	27.050.200

								yang Disusun			
								Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dok	820.150.000
				Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Lap	22.737.600
				Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dok	19.493.806.000

Jember, 16 Januari 2024
 Sekretaris DPRD Kab. Jember



SUTIYOSO, SH

NIP. 19721005 199803 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jl. Kalimantan No. 86 Telp. (0331) 335444 – 335567 (Fax.)
JEM B E R - 68121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUTYOSO, S.H

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

**SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
JEMBER,**

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.



SUTYOSO, S.H
NIP. 19721005 199803 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER**

NO. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100%

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	52.423.852.654	APBD
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.	23.960.914.020	APBD
	Jumlah	Rp.	76.384.766.674	


BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jember, 26 Januari 2024
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEMBER,

SUTIYOSO, S.H
NIP. 19721005 199803 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jl. Kalimantan No. 86 Telp. (0331) 335444 – 335567 (Fax.)
JEM B E R - 68121

Pos-el setwan@jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUTIYOSO, S.H

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

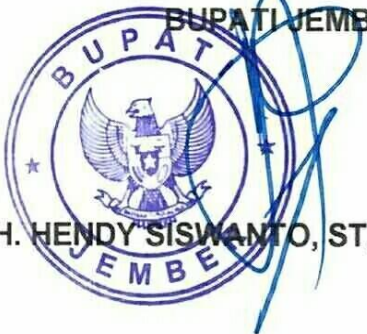
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 November 2024

Pihak Pertama

**SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
JEMBER,**

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng



SUTIYOSO, S.H
NIP. 19721005 199803 1 014

**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER**



NO. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program - program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 52.566.553.339	P – APBD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 23.960.914.020	P – APBD
Jumlah	Rp. 76.527.467.359	

BURATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jember, 26 November 2024
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEMBER,



SUTIYOSO, S.H
NIP. 19721005 199803 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JL. Kalimantan No. 86 Telp. (0331)335444-335567 (Fax) JEMBER - 68121

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 175/41/35.09.2/2024

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretariat DPRD ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

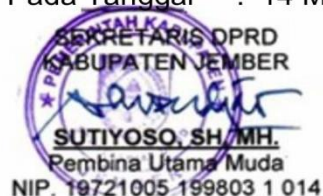
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Sekretariat DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 14 Maret 2024



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

- Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
- Tugas : Membantu Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Pimpinan DPRD
- Fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
c. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat DPRD; dan
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD
- Tujuan : Terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA, dan anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD
- Indikator Tujuan : Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatkan dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dalam rangka membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat & Komponen Pembangunan Daerah Lain-Lainnya	Pengintegrasian Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA, dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah program DPRD yang masuk dalam dokumen anggaran Setwan DPRD dibagi seluruh program DPRD x 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program-program DPRD dalam indikator ini terdiri dari : program pembentukan perda, program pengawasan DPRD dan program pembentukan anggaran) pada tahun berkenaan • Dokumen anggaran setwan adalah adalah DPA tahun berkenaan 	Sekretariat DPRD	

CASCADING SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER

